

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, M. (2014). *Panduan Penyusunan APB Desa*. Kebumen.
- Astuti, T. P., dan Yulianto. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1-14. Diakses dari <https://e-journal.unair.ac.id>
- Astuty, E., dan Fanida, E. H. (2012). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Diakses dari <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id>
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta. Diakses dari <http://www.bpkp.go.id>
- Caleb, B., dan Ade', G. (2012). Good Budgeting and Good Governance: A Comparative Discourse. *The Public Administration and Social Policies Review IV Year, No. 2(9) December 2012*. Diakses dari <https://papers.ssrn.com>
- Detik. (2017). *ICW Sebut Pak Kades Paling Banyak Korupsi Dana Desa*. Diakses pada 9 April 2018 dari <https://news.detik.com/berita/d-3596041/icw-sebut-pak-kades-paling-banyak-korupsi-dana-desa>
- Efferin, S., Darmadji, S. H., dan Tan, Y. (2008). *Metode Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta: GRAHA ILMU.
- Gustavson, M. (2013). *Auditing Good Government in Africa*. New York: Palgrave Macmillan
- Halim, A., Restianto, Y. E., dan Karman, I. W. (2010). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hanifah, S. I., dan Praptoyo, S. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol.4 No. 8*. Diakses dari <https://ejournal.stiesia.ac.id>
- KBBI. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Diakses pada 10 April 2018 dari <https://kbbi.web.id>

- Katadata. (2017). *Berapa Anggaran Untuk Dana Desa?*. Diakses pada 9 April 2018 dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/08/04/berapa-anggaran-untuk-dana-desa>
- Kompas. (2018). *Dana Desa Paling Banyak Dikorupsi, Polisi Minta Masyarakat Aktif Awasi*. Diakses pada 9 April 2018 dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/20/14223331/dana-desa-paling-banyak-dikorupsi-polisi-minta-masyarakat-aktif-awasi>
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Menteri Dalam Negeri. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- _____. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2016). *Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun*. Jakarta.
- _____. (2017). *Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Penetapan 17000 Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi*. Jakarta.
- Metronews. (2017). *Kemampuan SDM Mengelola Dana Desa Dinilai Masih Rendah*. Diakses pada 21 Juni 2018 dari <http://news.metrotvnews.com/politik/ybJex8WN-kemampuan-sdm-mengelola-dana-desa-dinilai-masih-rendah>
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Musdzalifah. (2016). *Evaluasi Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Wonosari Menurut Permendagri 113 Tahun 2014*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. (Tidak Dipublikasikan)
- Radar Banyumas. (2017). *Perdes Ganjal Pencairan Dana Desa di Kabupaten Banyumas*. Diakses pada 9 April 2018 dari <http://radarbanyumas.co.id/perdes-ganjal-pencairan-dana-desa-di-kabupaten-banyumas/>

- Rahmawati, H. I., Ayudiati, C., dan Surifah. (2015). Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *The 2nd University Research Coloquium*, 305-313.
- Republika. (2017). *Dana Desa Tahap II di Banyumas Belum Bisa Dicairkan*. Diakses pada 9 April 2018 dari <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/10/04/oxavas409-dana-desa-tahap-ii-di-banyumas-belum-bisa-dicairkan>
- Republik Indonesia. (2016). *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa*. Jakarta.
- _____. (1979). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa*. Jakarta.
- _____. (1999). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- _____. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- _____. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa*. Jakarta.
- _____. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa*. Jakarta.
- _____. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta.
- Riskawati, Amaliah, T. H., dan Lukum, A. (2016). Analysis of Local Government Performance in Managing Distribution of Village Funds (Case Study in Kalia Village, Talatako Sub-District, Tojo Una-Una District). *Journal of Accounting and Business Education*, 1(1), September 2016.
- Ritonga, I. T., & Syamsul. (2016). Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia: Berbasis Website. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*. Diakses dari <http://jurnal.uui.ac.id>
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Taufik, T. (2013). Pengelolaan Keuangan Desa dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia. *Jurnal Ekonomi* 17.
- Utomo, S. J. (2015). Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk Meningkatkan Pembangunan Desa. *Media Trend*. Vol. 10 No. 1. 19-31.
- Yuliansyah, dan Rusmianto. (2015). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.